



# **PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



## **RENCANA KERJA (RENJA ) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022**



SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2022.

## **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2022.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

## **Pasal 4**

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- ( 2 ) Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- ( 1 ) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2022 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2022 dan Renstra PD.
- ( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- ( 3 ) PD menyusun RKA Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja PD.

#### **Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2022.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

### **BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

- ( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- ( 2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021 NOMOR 28

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
ERI FORTUNA, SH  
NIP.19660104199303 1 006

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan OPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan komitmen dan dukungan semua pihak yang terkait, semoga pelaksanaan tugas yang diemban Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan dengan sukses dan lancar dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Sarilamak, Desember 2021

  
M. DARMAWIJAYA.SH  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 196909 200003 1 006



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RenjaSekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD .....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	II-17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD .....	II-20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-44
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	III-2



3.3 Program dan Kegiatan .....	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	IV-1
BAB V PENUTUP .....	V-1



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kalender penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022.....	I-2
Tabel T-C.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s.d Tahun 2019 Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-2
Tabel T-C.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-18
Tabel T-C.2.1 Pencapaian IKU Sekretariat DPRD.....	II-18
Tabel T-C.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-25
Tabel T-C.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 .....	II-44
Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022	III-5
Tabel T-C.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	IV-2



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan.

**I. Persiapan penyusunan Renja Sekretariat DPRD**, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun Kalender Penyusunan Renja Sekretariat DPRD dengan berpedoman kepada



Kalender Perencanaan RKPD dan Renja OPD Tahun 2022 yang telah disusun oleh Bapelitbang dan diserahkan ke OPD-OPD tanggal 4 November 2020 dalam rapat Persiapan dan Agenda Perencanaan Tahunan Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2022. Adapun jadwal disusun sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kalender Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022**

No	Jenis Tahapan	Waktu	Ket
<b>A</b>	<b>Persiapan Penyusunan</b>		
1	Penyusunan kalender Renja Sekretariat DPRD	Minggu II Bulan November 2020	
<b>B</b>	<b>Penyusunan Rancangan Awal Renja</b>		
1	Penyusunan Ranwal Renja berdasarkan surat permintaan Ranwal Renja OPD dan RKA	Minggu II Bulan November 2020	
2	Penyampaian Ranwal OPD ke Bapelitbang	Minggu I Bulan Desember 2020	
3	Penyempurnaan ranwal berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Minggu IV Bulan Januari 2021	
4	Penyampaian rancangan awal renja yang memuat rumusan kegiatan dan /atau kegiatan baru dalam forum Perangkat Daerah /lintas PD	Minggu IV Bulan Januari 2021	
<b>C</b>	<b>Pelaksanaan Forum Daerah/Lintas Perangkat Daerah</b>		
1	Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	Minggu IV Bulan Januari - Minggu II Bulan Februari 2021	
<b>D</b>	<b>Penyusunan Rancangan Renja</b>		
1	Penyampaian Rancangan Renja kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD	Minggu I bulan Februari 2021	
2	Menyempurnakan Rancangan Renja OPD berdasarkan hasil forum perangkat daerah	Minggu II Bulan Februari 2021	
3	Menyampaikan Renja yang telah disempurnakan ke Bapelitbang	Minggu III Bulan Februari 2021	
4	Verifikasi Renja oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja Sekretariat DPRD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD	Minggu III Bulan Februari 2021	



5	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi	Minggu IV Bulan Februari 2021	
6	Penyampaian kembali rancangan renja yang telah disempurnakan kepada Bapelitbang	Minggu IV bulan Februari 2021	
7	Penyempurnaan Renja OPD berdasarkan Berita acara verifikasi renja	Minggu I Bulan Maret 2021	
8	Penyampaian kembali Renja yang telah disempurnakan ke Bapelitbang	Minggu I Bulan Maret 2021	
<b>E</b>	<b>Perumusan Rancangan Akhir Renja</b>		
1	Penyempurnaan Renja berdasarkan Berita Acara Verifikasi Renja	Minggu I Bulan Maret 2021	
2	Penyampaian kembali Renja yang telah disempurnakan ke Bapelitbang	Minggu I bulan Maret 2021	
<b>F</b>	<b>Penetapan Renja</b>		
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir Renja berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkada RKPD	Minggu II bulan Juli 2021	
2	Verifikasi rancangan akhir Renja	Minggu II bulan Juli 2021	
3	Penyempurnaan rancangan akhir Renja berdasarkan hasil verifikasi oleh Bapelitbang	Minggu III bulan Juli 2021	
4	Penyempurnaan rancangan akhir Renja berdasarkan Perkada tentang RKPD	Minggu IV bulan Juli 2021	

## II. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Pada minggu II November 2020 mulai dilakukan penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat DPRD 2022 oleh tim Renja Sekretariat DPRD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio*. Penyusunan berpedoman pada hasil evaluasi Renja tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat DPRD mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;





- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

### **III. Penyusunan Rancangan Renja**

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Sekretariat DPRD kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah . Penyajian Rancangan Renja Sekretariat DPRD disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja.

Selanjutnya , Rancangan Renja yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Bapelitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim di Bapelitbang, maka Rancangan Renja disempurnakan dan hasil penyempurnaannya disampaikan kembali ke Bapelitbang.

### **IV. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah**

Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.



## **V. Perumusan Rancangan Akhir**

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD.

## **VI. Penetapan**

Dalam hal penetapan Renja, Sekretariat DPRD menyerahkan Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang Kab.Lima Puluh Kota untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2022 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026.



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Sekretariat DPRD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan Sekretariat DPRD.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD untuk tahun 2022.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Sekretariat DPRD ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat DPRD dan bagian - bagian di Sekretariat DPRD.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD pada tahun 2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Sekretariat DPR Tahun 2022 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

#### **I. Pendahuluan**

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Sekretariat DPRD, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

#### **II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu**

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan sebagainya.

#### **III. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD**



Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

Berisi ketentuan penutup.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2020 dan realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2020 disajikan Tabel T-C.1 sebagai berikut:



Tabel T-C.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2020  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran</b>	90%	60%	90%	90%	100%	90%	80%	100%
0.00.00.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan surat menyurat dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
		Jumlah pengadaan materai dalam satu tahun	Materai 6000:6750 Materai 3000:5652	Materai 6000:3750 .materai 3000:3644	Materai 6000:1700 Materai 3000:1.001	Materai 6000: 1680 Materai 3000: 1021	100%	Materai 6000:1600 Materai 3000:1300	Materai 6000:7030 materai 3000:5965	104,78%
0.00.00.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pembayaran rekening telepon ,listrik, air dan internet dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
		Jumlah kali pembayaran rekening	240 kali	144 kali	48 kali	48 kali	100%	48 kali	240 kali	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
		telepon ,listrik, air dan internet dalam satu tahun								
0.00.00.01.04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan general check up	175 orang	95 orang	35 orang	-	0,00%	35 orang	130 orang	74,28%
0.00.00.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pembayaran honor dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60bulan	100%
0.00.00.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan pengadaan alat kebersihan dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
		Jumlah bulan pengadaan jasa cleaning service	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
0.00.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk ATK dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
0.00.00.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan yang dipenuhi kebutuhan cetak dan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
		penggandaannya								
		Jumlah lembar penggandaan dalam satu tahun	1.300.000 lembar	886.131 lembar	131.000 lembar	130.874 lembar	99,90%	390.391 lembar	1.407.396 lembar	108,26%
0.00.00.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
0.00.00.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan pengadaan bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang di adakan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
0.00.00.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan kebutuhan belanja makanan minuman dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
		Jumlah porsi makan minum harian yang disediakan dalam satu tahun	18.000 porsi	12.049 porsi	2.516 porsi	2.509porsi	99,72%	0 porsi	14.558 porsi	80,87%
		Jumlah porsi makan minum tamu yang	30.000 porsi	18.268 porsi	5.406 porsi	5.392 porsi	99,74%	7.166 porsi	30.826 porsi	102,%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
		disediakan dalam satu tahun								
		Jumlah bulan kebutuhan belanja makan minum rumah dinas Ketua DPRD dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
0.00.00.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan kebutuhan penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun yang dipenuhi	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
<b>0.00.00.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
0.00.00.02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah bulan kebutuhan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100 %
0.00.00.02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah	Jumlah bulan kebutuhan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
	jabatan/dinas	pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas								
0.00.00.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100 %
0.00.00.02.23.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100 %
0.00.00.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100 %
<b>0.00.00.03.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD dan Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>35,5%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>71,7%</b>	<b>71,7%</b>
0.00.00.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Jumlah bulan kebutuhan pengadaan pakaian	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
		dinas								
		Jumlah stel pengadaan pakaian dinas	1630 stel	580 stel	290 stel	290 stel	100%	200 stel	1.070 stel	65,64%
<b>0.00.00.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas aparatur</b>	<b>80%</b>	<b>51,28%</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>63,24%</b>	<b>79,05%</b>
0.00.00.05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	75 orang	38 orang	2 orang	1 orang	50%	5 orang	44 orang	58,67%
0.00.00.05.03.	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	42 Orang	22 orang	10 orang	3 orang	30%	5 orang	30 orang	71,42%
<b>0.00.00.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
0.00.00.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	20 dokumen	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
	SKPD									
0.00.00.06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	100%
0.00.00.06.03.	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	100%
0.00.00.06.04.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	100%
	<b>Sekretariat</b>									
<b>4.00.01.23.</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Persentase kelancaran penyampaian informasi kegiatan DPRD ke masyarakat</b>	<b>85%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
4.00.01.23.01.	Penyusunan Sistem Informasi Layanan Publik	Jumlah bulan pembayaran untuk layanan informasi ke masyarakat	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
		Jumlah bulan Pembayaran langganan media	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
		massa/ media cetak dan elektronik , biaya berita pariwisata, dan biaya peliputan media cetak dan elektronik								
4.00.01.26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketersediaan dokumentasi buku perundangan-undangan dan tenaga ahli fraksi	90%	60%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
4.00.01.26.01.	Koordinasi Kerjasama permasalahan peraturan perundangan	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Ahli Fraksi dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
		Jumlah orang tenaga ahli fraksi DPRD	40 orang	24 orang	8 orang	8 orang	100%	8 orang	40 orang	100%
4.00.01.26.05.	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan kebutuhan cetak buku aturan perundang-undangan dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
	<b>Sekretariat DPRD</b>									
4.00.02.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan yang mendukung pada peningkatan kapasitas anggota DPRD	95%	60%	90%	80%	80%	90%	80%	80%
4.00.02.15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas dalam satu tahun	66 Ranperda	35 Ranperda	10 Ranperda	3 Ranperda	30%	13 Ranperda	51 Ranperda	77,27%
4.00.02.15.02.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama	Jumlah bulan kebutuhan dialog / hearing yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
		Jumlah dialog / hearing yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 kali	12 kali	8 kali	8 kali	100%	4 kali	20 kali	100%
4.00.02.15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
		Jumlah terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan dalam satu tahun	500 kali	277 kali	100 Kali	98 kali	<b>98%</b>	100 kali	475 kali	95%
4.00.02.15.04.	Rapat-rapat paripurna	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat paripurna dalam satu tahun	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
		Jumlah terlaksananya rapat-rapat paripurna dewan dalam satu tahun	150 kali	76 kali	30 kali	28 kali	<b>93,33%</b>	30 kali	134 kali	89,33%
4.00.02.15.05.	Kegiatan Reses	Jumlah terlaksana kegiatan reses anggota DPRD ke daerah pemilihan dalam satu tahun	15 kali	9 kali	3 kali	3 kali	<b>100%</b>	3 kali	15 kali	100%
4.00.02.15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam satu tahun	45 kali	27 kali	9 kali	9 kali	100%	9 kali	45 kali	100%





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10= 5 + 7 + 9	11 = ( 10 / 4 )
4.00.02.15.07.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah frekuensi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam satu tahun	220 kali	132	44 kali	44 kali	100%	55 kali	231 kali	105%



Selanjutnya evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Adapun program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program **Pelayanan Administrasi Perkantoran**, beberapa kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2. Program **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, beberapa kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
  - Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah dinas/jabatan



- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
3. Program **Peningkatan Disiplin Aparatur**, kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100 %, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya yakni:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program **Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**, beberapa kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100 %, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
  - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
  - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Program **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**, kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya yakni:
- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
6. Program **Penataan Peraturan Perundang-Undangan**,beberapa kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:



- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang Undangan
  - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
7. Program **Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, beberapa kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 100%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
- Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama
  - Rapat - Rapat alat Kelengkapan Dewan
  - Rapat - Rapat Paripurna
  - Kegiatan Reses
  - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
  - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- II. Program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program **Pelayanan Administrasi Perkantoran**, ada kegiatan yang pencapaian targetnya sebesar 100% tidak terpenuhi, sehingga tingkat realisasinya adalah sebesar 0,00%, adapun kegiatan yang belum tercapai targetnya yakni :

- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan PNS, tidak tercapainya target realisasi yang direncanakan sebesar 35 orang disebabkan tidak ada anggota DPRD mengikuti *medical check up* karena telah dilaksanakan pada akhir tahun 2019.



2. Program **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** ada dua kegiatan yang tidak tercapai. Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal ditargetkan 2 orang untuk melakukan pendidikan dan pelatihan formal dan hanya terealisasi 1 orang. Sedangkan BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-undangan direncanakan target pencapaiannya sebesar 2 orang, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 1 orang, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 50%. Adapun kegiatan yang belum tercapai targetnya antara lain:

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal tidak tercapai target Kinerja karena disebabkan karena adanya kebijakan anggaran yang menempatkan anggaran kasnya di triwulan IV sehingga tidak bisa terlaksana secara maksimal karena keterbatasan waktu, disamping itu belum adanya kelas BIMTEK yang dibuka oleh Kementrian atau lembaga terkait.

- Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pada kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan, tidak tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya kebijakan anggaran yang menempatkan anggaran kasnya di triwulan IV sehingga tidak bisa terlaksana secara maksimal karena keterbatasan waktu, disamping itu belum adanya kelas BIMTEK yang dibuka oleh Kementrian atau lembaga terkait.

3. Program **Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, Kegiatan direncanakan target pencapaiannya 13 Ranperda untuk dibahas, realisasi pencapaiannya adalah 3 Ranperda sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 30%. Adapun kegiatan yang belum tercapai targetnya yakni:

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah



Pada kegiatan Pembahasan Ranperda, tidak tercapainya realisasi pembahasan Ranperda sebanyak 13 Ranperda disebabkan karena tidak ada pembahasan dari Anggota DPRD karena Refocussing anggaran untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

III. Program dan kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait sesuai yang ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sehingga tidak ada penjelasan dalam tabel T-C.2



**Tabel T-C.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK KD dalam RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel T-C.2.1**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretaris DPRD**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah/RPJMD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Limapuluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	80%	82,85%	90%	90%	
	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	50	51	55	60	65	70	-	-	-	-	-	-	



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pencapaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD berupa indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan telah mencapai target yang diinginkan bahkan ada yang melebihi target yang dituju yakni pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019 berdasarkan hasil survey kepuasan yang dilakukan terhadap 35 orang anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Sementara itu nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum ada penilaian dari pejabat yang berkompeten dalam memberikan penilaian kinerja yakni pihak Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.





### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap *stakeholdersnya*
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2020 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Pelayanan terhadap kegiatan rapat-rapat DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelayanan rapat-rapat DPRD secara umum sudah dilakukan secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal rapat / persidangan yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir persidangan mulai dari penyiapan administrasi rapat, konsumsi sampai risalah telah dilakukan secara maksimal.

2. Pelayanan terhadap kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kunjungan Kerja DPRD secara umum sudah dilakukan secara maksimal. Ini terbukti setiap jadwal



kunjungan kerja yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan kunjungan kerja DPRD mulai dari penyiapan administrasi Kunjungan Kerja, mendampingi langsung ke lapangan, penyusunan laporan kunjungan kerja DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya

### 3. Pelayanan terhadap kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD secara umum sudah dilakukan secara maksimal. Ini terbukti setiap jadwal Bimtek yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Bimtek DPRD mulai dari penyiapan administrasi Bimtek, mendampingi langsung kegiatan Bimtek, penyusunan laporan kegiatan Bimtek DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

### 4. Pelayanan terhadap kegiatan Reses Anggota DPRD ke daerah pemilihannya.

Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Reses anggota DPRD secara umum sudah dilakukan secara maksimal. Ini terbukti setiap jadwal Reses yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Reses DPRD mulai dari penyiapan administrasi Reses, mendampingi langsung kegiatan Reses, penyusunan laporan kegiatan Reses DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

### 5. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan Anggota DPRD seperti melalui *Whatsapp group*.



Selain itu keberhasilan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2020 sudah cukup optimal didapat dari hasil tanya jawab berupa kuisisioner dengan seluruh anggota DPRD, dimana untuk tahun 2020 ini, dari 35 orang anggota DPRD, 32 orang ( 91,42%) diantaranya menyatakan puas atas pelayanan-pelayanan kegiatan administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk Informasi, ukuran dan skala pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan teknik analisis data berupa kuisisioner.

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa kelemahan, antara lain:

1. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang memahami sepenuhnya tugas dan tanggungjawabnya sehingga adakalanya terjadi miskomunikasi dengan anggota DPRD.
2. Belum semua ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD yang mempunyai sumber daya yang memadai sehingga memperlambat pelaksanaan tugas anggota DPRD.
3. Adanya sebagian dari ASN maupun Tenaga Harian Lepas dilingkungan Sekretariat DPRD terutama yang langsung terkait dengan pelayanan persidangan setengah hati melayani anggota DPRD sehingga berdampak pada ketidaknyamanan hubungan antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD itu sendiri.
4. Masih kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan persidangan seperti sound sistem dan kebersihan ruangan.
5. Dalam hal kebersihan ruang pribadi seperti kamar kecil sering menjadi polemik diantara anggota DPRD sehingga sering menjadi bahan pertanyaan bagi sebagian anggota DPRD didalam berbagai persidangan / rapat DPRD.
6. Persoalan ketersediaan air untuk kebutuhan kantor sampai saat ini masih menjadi masalah bagi anggota DPRD akibat suplay air dari pihak PDAM yang tidak lancar.



Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota DPRD sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi antar bagian-bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani seluruh kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
2. Lemahnya sumber daya manusia yang mendukung pelayanan terhadap kelancaran tugas anggota DPRD.
3. Adanya ego sektoral masing-masing bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya rasa kebersamaan sesama aparatur dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani anggota DPRD
5. Kurangnya pemahaman masing-masing personil ASN maupun THL terhadap tugas dan fungsinya.
6. Adanya penempatan personil yang tidak sesuai keahliannya dengan tugas yang diembannya.
7. Belum optimalnya partisipasi ASN dan THL dalam mendukung kelancaran tugas anggota DPRD.

Merujuk pada permasalahan yang ada, untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD di masa mendatang, tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam beberapa tahun mendatang adalah:

- Semakin strategisnya peran Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam memfasitasi kegiatan DPRD baik dalam persidangan/rapat maupun kegiatan yang terkait dengan reses, kunjungan kerja dan penyelenggaraan bimbingan teknis.
- Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;
- Meningkatnya tuntutan anggota DPRD terhadap pelayanan yang maksimal, cepat dan tepat waktu.
- Arus Informasi yang semakin cepat dan penggunaan berbagai aplikasi



teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi ASN maupun THL dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

- Penyediaan lahan parkir kantor yang layak dan memadai untuk anggota DPRD dan tamu yang berkunjung ke kantor Sekretariat DPRD.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan system layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal untuk memfasilitasi kebutuhan informasi anggota DPR
- Adanya peluang meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dalam ruangan persidangan berupa peralatan sound sistem dan konsumsi serta diluar persidangan berupa kegiatan kunjungan kerja, reses dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel T-C.3 di bawah ini.



**Tabel T-C.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	23.451.573.437	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	23.451.573.437	
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		100	43.798.800	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		100	43.798.800	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	2 dokumen	6.300.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	2 dokumen	6.300.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	5.811.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	5.811.700	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	6.299.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	6.299.800	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	6.287.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	6.287.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	5.625.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	5.625.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	7.430.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	7.430.700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	6.043.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	6.043.500	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi Keuangan</b>		<b>100</b>	<b>3.157.402.137</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat</b>	<b>Persentase tertib administrasi Keuangan</b>		<b>100</b>	<b>3.157.402.137</b>	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
						<b>Daerah</b>					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	35 orang	2.909.932.437	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	35 orang	2.909.932.437	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-Pembayaran Honorarium THL -Pembayaran belanja Lembur	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	-96 OB -7370 OJ	205.525.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-Pembayaran Honorarium THL -Pembayaran belanja Lembur	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	-96 OB -7370 OJ	205.525.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Verifikasi SPJ Keuangan dalam 1 tahun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4800 SPJ	17.669.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Verifikasi SPJ Keuangan dalam 1 tahun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4800 SPJ	17.669.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	8.021.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	8.021.600	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 dokumen	6.443.600	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 dokumen	6.443.600	
	Koordinasi dan	Jumlah	Set.DPRD	13 dokumen	5.299.500	Koordinasi dan	Jumlah	Set.DPRD	13 dokumen	5.299.500	





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	laporan keuangan bulanan dan semesteran yang disiapkanLaporan	Kab.Lima Puluh Kota			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	laporan keuangan bulanan dan semesteran yang disiapkanLaporan	Kab.Lima Puluh Kota			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	4.510.300	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	4.510.300	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>384.500.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>384.500.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- PDH khaki - PDH hitam putih - Pakaian Korpri - Pakaian Daerah - Pakaian Olahraga	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	-80 stel -80 stel -150 stel	190.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- PDH khaki - PDH hitam putih - Pakaian Korpri - Pakaian Daerah - Pakaian Olahraga	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	-80 stel -80 stel -150 stel	190.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Aparatur yang mengikuti	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	8 orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Aparatur yang mengikuti	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	8 orang	75.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	dan Fungsi	Diklat				Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	18 orang	119.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	18 orang	119.000.000	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>1.351.039.600</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>1.351.039.600</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-ATK -penggunaan -bahan cetak -materai -Penyediaan Peralatan mesin dan Non Mesin -Perlengkapan dinas -sewa peralatan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-6332 bh -40000 lbr -320 bh -3000 lembar -85 unit  -80 buah -15 set	639.371.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-ATK -penggunaan -bahan cetak -materai -Penyediaan Peralatan mesin dan Non Mesin -Perlengkapan dinas -sewa peralatan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-6332 bh -40000 lbr -320 bh -3000 lembar -85 unit  -80 buah -15 set	639.371.900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-Bahan yang dicetak -penggunaan -Plakat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-14 jenis -158.800 lembar -36 bh	110.129.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-Bahan yang dicetak -penggunaan -Plakat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-14 jenis -158.800 lembar -36 bh	110.129.700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan	-Jumlah bahan bacaan dan	Kab. Lima Puluh Kota,	300 buku	37.943.000	Penyediaan Bahan Bacaan	-Jumlah bahan bacaan dan	Kab. Lima Puluh Kota,	300 buku	37.943.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	Perundang-undangan	peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Harau, Sarilamak			dan peraturan Perundang-undangan	peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Harau, Sarilamak			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu pembayaran Honor THL	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-10.712 porsi -48 OB	265.507.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu pembayaran Honor THL	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-10.712 porsi -48 OB	265.507.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	- 12 dokumen	298.087.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	- 12 dokumen	298.087.500	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>		<b>100</b>	<b>1.271.847.500</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>		<b>100</b>	<b>1.271.847.500</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	-Kendaraan Roda 4 -Kendaraan Roda 2	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	- 1 Unit -15 Unit	598.734.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	-Kendaraan Roda 4 -Kendaraan Roda 2	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	- 1 Unit -15 Unit	598.734.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-Kendaraan Roda 4	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-1 unit	441.079.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-Kendaraan Roda 4	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-1 unit	441.079.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-Alat listik -Perlengkapan dinas -BM kebutuhan kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-160 bh -835 bh -97 unit	232.034.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-Alat listik -Perlengkapan dinas -BM kebutuhan kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-160 bh -835 bh -97 unit	232.034.500	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>558.188.600</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>558.188.600</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Materai 10.000	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1350 lembar	13.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Materai 10.000	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1350 lembar	13.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	-TagihanTelpo n -Tagihan Air -Tagihan listrik -Tagihan Internet -Tagihan TV berlangganan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-24 Rekening -24 Rekening -24 Rekening -24 Rekening	196.729.600	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	-TagihanTelpo n -Tagihan Air -Tagihan listrik -Tagihan Internet -Tagihan TV berlangganan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-24 Rekening -24 Rekening -24 Rekening -24 Rekening	196.729.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mesin potong rumput penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih jasa cleaning servis	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	- 1 unit - 1674 buah - 12 bulan	347.959.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mesin potong rumput penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih jasa cleaning servis	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	- 1 unit - 1674 buah - 12 bulan	347.959.000	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Persentase Barang milik daerah yang ber kondisi</b>		<b>100</b>	<b>3.034.772.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Barang milik daerah yang ber kondisi</b>		<b>100</b>	<b>3.034.772.000</b>	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	<b>Pemerintahan Daerah</b>	<b>baik</b>				<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>baik</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 16 unit dalam 1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua kelurahan	12 bulan	732.110.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 16 unit dalam 1 tahun	Semua Kabupaten/Kota, semua Kecamatan, semua kelurahan	12 bulan	732.110.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional sebanyak 4 unit dalam 1 tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 bulan	410.450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional sebanyak 4 unit dalam 1 tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 bulan	410.450.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas dalam 1 tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 bulan	1.499.192.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas dalam 1 tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 bulan	1.499.192.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Pelumas -Perabot kantor -Alat listrik pemeliharaan alat kantor -paket pengerjaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-230 liter -2 unit -191 bh -101 unit 3 paket	393.020.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Pelumas -Perabot kantor -Alat listrik pemeliharaan alat kantor -paket pengerjaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-230 liter -2 unit -191 bh -101 unit 3 paket	393.020.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		pemeliharaan kantor					pemeliharaan kantor				
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>100</b>	<b>419.895.000</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>100</b>	<b>419.895.000</b>	
	Fasilitasi Keprotokolan	Terlayannya protokol pimpinan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 laporan	119.944.000	Fasilitasi Keprotokolan	Terlayannya protokol pimpinan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 laporan	119.944.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Komprensi Pers	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 kali	65.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Komprensi Pers	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 kali	65.000.000	
	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	-Pendokumentasian tugas pimpinan - Cetak foto kegiatan pimpinan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-12 laporan -3000 lembar	234.951.000	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	-Pendokumentasian tugas pimpinan - Cetak foto kegiatan pimpinan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-12 laporan -3000 lembar	234.951.000	
	<b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>100</b>	<b>12.451.947.500</b>	<b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>100</b>	<b>12.451.947.500</b>	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang	12.173.207.500	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang	12.173.207.500	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-PSH DPRD -PSR DPRD -PDH DPRD -Pin DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-35 stel -35 stel -70 stel -7 gr	226.240.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-PSH DPRD -PSR DPRD -PDH DPRD -Pin DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-35 stel -35 stel -70 stel -7 gr	226.240.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Check UP DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang	52.500.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Check UP DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang	52.500.000	
	<b>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>100</b>	<b>778.182.300</b>	<b>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>100</b>	<b>778.182.300</b>	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 bulan	23.860.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi keanggotaan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 bulan	23.860.000	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	-Makanan fraksi -Minuman fraksi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-225 porsi makanan -225 porsi minuman	31.130.200	Fasilitasi Fraksi DPRD	-Makanan fraksi -Minuman fraksi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-225 porsi makanan -225 porsi minuman	31.130.200	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-Pelaksanaan Rapat AKD- -pelaksanaan rapat paripurna -Pembayaran Honor THL	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-135 kali -40 kali -120 OB	357.010.600	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-Pelaksanaan Rapat AKD- -pelaksanaan rapat paripurna -Pembayaran Honor THL	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-135 kali -40 kali -120 OB	357.010.600	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-pengadaan Komputer -ATK -peralatan komputer -Perlengkapan dinas -Televisi -lemari arsip	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-14 unit -325 bh -13 unit -12 unit -4 unit 3 unit	366.181.500	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-pengadaan Komputer -ATK -peralatan komputer -Perlengkapan dinas -Televisi -lemari arsip	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-14 unit -325 bh -13 unit -12 unit -4 unit 3 unit	366.181.500	
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>		<b>100</b>	<b>20.599.279.100</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>		<b>100</b>	<b>20.599.279.100</b>	
	<b>Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>100</b>	<b>5.340.872.600</b>	<b>Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>100</b>	<b>5.340.872.600</b>	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan Propemperda	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 SK	5.002.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan Propemperda	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 SK	5.002.000	





No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	13 Ranperda	5.199.934.200	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	13 Ranperda	5.199.934.200	
	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Perundang-undangan yang di kaji	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Per-UU	21.823.400	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Perundang-undangan yang di kaji	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Per-UU	21.823.400	
	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	naskah akademik Peraturan Daerah yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 dokumen	94.113.000	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	naskah akademik Peraturan Daerah yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 dokumen	94.113.000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	dokumen Tatib	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	dokumen Tatib	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	20.000.000	
	<b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>100</b>	<b>196.503.500</b>	<b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>100</b>	<b>196.503.500</b>	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	32.970.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	32.970.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	32.880.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan	Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	32.880.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		Perubahan PPAS				PPAS	Perubahan PPAS				
	Pembahasan APBD	Nota Kesepakatan APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	31.856.400	Pembahasan APBD	Nota Kesepakatan APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	31.856.400	
	Pembahasan APBD Perubahan	Nota Kesepakatan Perubahan APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	33.062.400	Pembahasan APBD Perubahan	Nota Kesepakatan Perubahan APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	33.062.400	
	Pembahasan Laporan Semester	Nota Kesepakatan laporan Semesteran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	33.062.300	Pembahasan Laporan Semester	Nota Kesepakatan laporan Semesteran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	33.062.300	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Catatan atas laporan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	32.672.400	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Catatan atas laporan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	32.672.400	
	<b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>100</b>	<b>451.524.000</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>100</b>	<b>451.524.000</b>	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Koordinasi dan konsultasi Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	30 Orang	235.664.500	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Koordinasi dan konsultasi Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	30 Orang	235.664.500	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		dan Hukum					dan Hukum				
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	147.280.500	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	147.280.500	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	23.493.300	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	23.493.300	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	4.857.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	4.857.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	4.875.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	4.875.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Laporan Capaian TLH Temuan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	25.657.700	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Laporan Capaian TLH Temuan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	25.657.700	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Laporan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	4.857.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Laporan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	4.857.000	
	Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 laporan	4.857.000	Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 laporan	4.857.000	
	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>100</b>	<b>5.151.466.500</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>100</b>	<b>5.151.466.500</b>	
	Bimbingan Teknis DPRD	-Bimtek dalam provinsi -Bimtek luar provinsi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-3 kali -3 kali	947.887.000	Bimbingan Teknis DPRD	-Bimtek dalam provinsi -Bimtek luar provinsi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-3 kali -3 kali	947.887.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	-Majalah/buletin DPRD -Langganan koran 1 -Langganan Majalah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-12 edisi -41760 eksemplar -2080 eksemplar	1.366.756.00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	-Majalah/buletin DPRD -Langganan koran 1 -Langganan Majalah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-12 edisi -41760 eksemplar -2080 eksemplar	1.366.756.00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		Nasional					Nasional				
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pembayaran honorarium Ahli AKD -Jasa Appraisal	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-24 OB -1 Appraisal	137.999.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pembayaran honorarium Ahli AKD -Jasa Appraisal	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-24 OB -1 Appraisal	137.999.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pembayaran honorarium Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	96 OB	319.791.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pembayaran honorarium Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	96 OB	319.791.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Komperensi Pers	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 kali	234.104.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Komperensi Pers	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 kali	234.104.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya dokumen penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya dokumen penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	10.000.000	
	<b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Terselenggara Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>100</b>	<b>1.182.935.100</b>	<b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Terselenggara Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>100</b>	<b>1.182.935.100</b>	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kunjungan Kerja Komisi ke Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-360 OH	263.517.100	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kunjungan Kerja Komisi ke Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-360 OH	263.517.100	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	-Hearing/dialog dalam satu tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau,	-20 kali	127.375.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	-Hearing/dialog dalam satu tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau,	-20 kali	127.375.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
			Sarilamak					Sarilamak			
	Pelaksanaan Reses	Reses anggota DPRD dalam satu tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 kali	792.043.000	Pelaksanaan Reses	Reses anggota DPRD dalam satu tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 kali	792.043.000	
	<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>100</b>	<b>170.000.900</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>100</b>	<b>170.000.900</b>	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	132.750.900	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	132.750.900	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kasus pelanggaran kode Etik DPRD yang diselesaikan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Laporan	32.750.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kasus pelanggaran kode Etik DPRD yang diselesaikan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Laporan	32.750.000	
	<b>Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah</b>		<b>100</b>	<b>43.674.500</b>	<b>Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggara any Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah</b>		<b>100</b>	<b>43.674.500</b>	
	Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 kegiatan	24.999.800	Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 kegiatan	24.999.800	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		Daerah					Daerah				
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dokumen bahan komunikasi dan publikasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Edisi	18.674.700	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dokumen bahan komunikasi dan publikasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Edisi	18.674.700	
	<b>Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>100</b>	<b>8.062.302.000</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>100</b>	<b>8.062.302.000</b>	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-Kunker Komisi dalam provinsi -Kunker Komisi Luar Provinsi -Konsultasi Komisi Dalam Provinsi -Konsultasi Komisi Luar Provinsi -Konsultasi Bamus dalam Provinsi -Konsultasi Bamus Luar Provinsi -Konsultasi Banggar dalam Provinsi -Konsultasi Banggar Luar Provinsi -Konsultasi Bapemperda	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	- 5 kali - 5 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali	6.999.999.800	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-Kunker Komisi dalam provinsi -Kunker Komisi Luar Provinsi -Konsultasi Komisi Dalam Provinsi -Konsultasi Komisi Luar Provinsi -Konsultasi Bamus dalam Provinsi -Konsultasi Bamus Luar Provinsi -Konsultasi Banggar dalam Provinsi -Konsultasi Banggar Luar Provinsi -Konsultasi Bapemperda	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	- 5 kali - 5 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali - 4 kali	6.999.999.800	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	13
		dalam Provinsi -Konsultasi Bapemperda Luar Provinsi -Konsultasi BK dalam Provinsi -Konsultasi BK Luar Provinsi -Kunjungan Kerja/Konsultasi Lainnya Anggota DPRD		- 9 kali			dalam Provinsi -Konsultasi Bapemperda Luar Provinsi -Konsultasi BK dalam Provinsi -Konsultasi BK Luar Provinsi -Kunjungan Kerja/Konsultasi Lainnya Anggota DPRD		- 9 kali		
	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Laporan Kinerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Dokumen	49.384.000	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Laporan Kinerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Dokumen	49.384.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 kegiatan	30.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 kegiatan	30.000.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Konsultasi Pimpinan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	30 kali	982.918.200	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Konsultasi Pimpinan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	30 kali	982.918.200	
	<b>Jumlah</b>				<b>44.050.852.537</b>	<b>Jumlah</b>				<b>44.050.852.537</b>	





## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2022 ini secara umum tidak menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Sekretariat DPRD tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Renja Sekretariat DPRD. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 tidak ada penjelasannya.

**Tabel T-C.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-





2.6



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan“ dijelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Ada 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Adapun ke empat pilar tersebut adalah :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan



Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 adalah sbb:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
7. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Dengan berpedoman pada tema Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 termasuk 7 agenda rancangan Pembangunan Nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat DPRD belum terkait langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dimaksud .

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Daerah. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan dalam memfasilitasi DPRD dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka membahas suatu Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Fasilitasi kegiatan dilakukan dalam bentuk penunjang kegiatan Rapat/ Komisi/ Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk pembahasan suatu Rancangan Peraturan melalui pencapaian



tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Untuk menyelaraskan dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk strategi sesuai dengan peran Sekretariat DPRD. Adapun misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan rapat-rapat dan persidangan DPRD.
2. Memberikan pelayanan prima terhadap kunjungan kerja, reses dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
3. Memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pemerintah dan pembangunan oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
4. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan pengembangan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan fungsi dan tugas-tugas DPRD ;
6. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan prima terhadap pimpinan dan anggota DPRD ;
7. Meningkatkan perencanaan Sekretariat DPRD dalam mendukung pemberian pelayanan prima.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Acuan Sekretariat DPRD dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah .
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2022.

Sasaran :

1. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD untuk peningkatan kapasitas kinerja DPRD Lima Puluh Kota.



2. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi keberdayaan alat kelengkapan DPRD Limapuluh Kota.
3. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pembentukan Perda .
4. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi peningkatan penyelenggaraan fungsi penganggaran yang berpihak kepada masyarakat
5. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD bagi penyelenggaraan fungsi pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2022 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 .

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah, untuk tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ditetapkan 2 program, 18 kegiatan dan 78 Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi atas beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
10. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Sedangkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dibagi atas beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Berdasarkan uraian program dan kegiatan seperti tersebut diatas, dapat di urai menjadi sub-sub kegiatan. Ringkasan program, kegiatan dan sub Kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen





			<p>Perubahan RKA-SKPD</p> <p>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</p> <p>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>
		<p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaaa</p> <p>6. Koordinasi dan</p>



			<p>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran</p> <p>7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p>
		<p>3.Administrasi Kependagawaian Perangkat Daerah</p>	<p>1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p>
		<p>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>3. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan</p> <p>4. Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</p>



			SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan</li> <li>2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</li> <li>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</li> </ol>
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional</li> <li>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau</li> </ol>



			Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		8. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1. Fasilitas Keprotokolan 2. Fasilitas Komunikasi Pimpinan 3. Pendokumentasi Tugas Pimpinan
		9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
		10. Layanan Administrasi DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 2. Fasilitas Fraksi DPRD 3. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
2.	Dukungan Pelaksanaan Tugas	1. Pembentukan Peraturan Daerah	1. Penyusunan dan Pembahasan Program



	dan Fungsi DPRD	dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3. Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan 4. Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
		2. Pembahasan Kebijakan Anggaran	1. Pembahasan KUA dan PPAS 2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Pembahasan APBD 4. Pembahasan APBD Perubahan 5. Pembahasan Laporan Semester 6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
		3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum



			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</li> <li>3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</li> <li>4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</li> <li>5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</li> <li>6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK</li> <li>7. Pengawasan Penggunaan Anggaran</li> <li>8. Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</li> </ul>
		4. Peningkatan Kapasitas DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan Teknis DPRD</li> <li>2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan</li> <li>3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</li> <li>4. Penyediaan Tenaga Ahli</li> </ul>



			Fraksi 5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 6. Penyusunan Program Kerja DPRD
		5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah 2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran 3. Pelaksanaan Reses
		6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1. Penyusunan Kode Etik DPRD 2. Pengawasan Kode Etik DPRD
		7. Pembahasan Kerjasama Daerah	1. Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 2. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
		8. Fasilitasi Tugas DPRD	1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2. Penyusunan laporan Kinerja DPRD 3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah



			4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
--	--	--	-----------------------------------

Dengan demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2022 menjadi 2 program 18 kegiatan dan 78 Sub kegiatan

Terkait dengan identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal Bab II pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian pada Sekretariat DPRD tidak terkait langsung Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga tidak ditemukan adanya permasalahan untuk dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Sekretariat DPRD.

**Tabel T-B.36**

**Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interprestasi belum tercapai (<) sesuai(-) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	-	-	-	-





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini disusun mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan belum bisa mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021 - 2026 karena masih menunggu penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 - 2026 serta visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel T-C.5 berikut:



**TABEL T-C.5**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD**  
**TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Nama Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Unit
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	23.451.573.437			100	23.514.044.037	
4	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		100	43.798.800			100	106.269.400	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	2 dokumen	6.300.600	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	6.300.600	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	5.811.700	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	10.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	6.299.800	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	10.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	6.287.000	Dana Transfer Umum-		1 dokumen	56.912.600	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan



										DAU				
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	5.625.500	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	5.625.500	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	7.430.700	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	7.430.700	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	6.043.500	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	10.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi Keuangan</b>		<b>100</b>	<b>3.157.402.137</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>3.157.402.137</b>	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	35 orang	2.909.932.437	Dana Transfer Umum-DAU		35 orang	2.909.932.437	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-Pembayaran Honorarium THL -Pembayaran belanja Lembur	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	-96 OB -7370 OJ	205.525.000	Dana Transfer Umum-DAU		-96 OB -7370 OJ	205.525.000	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Verifikasi SPJ Keuangan dalam 1 tahun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	4800 SPJ	17.669.700	Dana Transfer Umum-DAU		4800 SPJ	17.669.700	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 dokumen	8.021.600	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	8.021.600	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	3 dokumen	6.443.600	Dana Transfer Umum-DAU		3 dokumen	6.443.600	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan



4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran yang disiapkanLaporan	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	13 dokumen	5.299.500	Dana Transfer Umum-DAU		13 dokumen	5.299.500	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	1 Dokumen	4.510.300	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	4.510.300	Sub Bagian Fasilitas Penganggaran/ Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4	02	01	2.05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>384.500.000</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>384.500.000</b>	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- PDH khaki - PDH hitam putih - Pakaian Korpri - Pakaian Daerah - Pakaian Olahraga	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	-80 stel -80 stel -150 stel	190.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		-35 stel -150 stel -80 stel	190.500.000	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	8 orang	75.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		8 orang	75.000.000	Sub Bagian TU dan Kepegawaian / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	Set.DPRD Kab.Lima Puluh Kota	18 orang	119.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		18 orang	119.000.000	Sub Bagian kajian Perundang-Undangan / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	01	2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100</b>	<b>1.351.039.600</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>1.351.039.600</b>	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-ATK -penggandaan -bahan cetak -materai -Penyediaan Peralatan mesin dan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-6332 bh -40000 lbr -320 bh -3000 lembar -85 unit	639.371.900	Dana Transfer Umum-DAU		-6332 bh -40000 lbr -320 bh -3000 lembar -85 unit	639.371.900	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan



						Non Mesin -Perlengkapan dinas -sewa peralatan		-80 buah -15 set				-80 buah -15 set		
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-Bahan yang dicetak -penggandaan -Plakat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-14 jenis -158.800 lembar -36 bh	110.129.700	Dana Transfer Umum-DAU		-14 jenis -158.800 lembar -36 bh	110.129.700	Sub Bagian TU dan Kepegawaian / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	-Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	300 buku	37.943.000	Dana Transfer Umum-DAU		300 buku	37.943.000	Sub Bagian Persidangan dan Risalah / Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu pembayaran Honor THL	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-10.712 porsi -48 OB	265.507.500	Dana Transfer Umum-DAU		-10.712 porsi -48 OB	265.507.500	Sub Bagian TU dan Kepegawaian / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	- 12 dokumen	298.087.500	Dana Transfer Umum-DAU		- 12 dokumen	298.087.500	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</b>		<b>100</b>	<b>1.271.847.500</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>232.034.500</b>	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	-Kendaraan Roda 4 -Kendaraan Roda 2	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	- 1 Unit -15 Unit	598.734.000	Dana Transfer Umum-DAU		0	0	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-Kendaraan Roda 4	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-1 unit	441.079.000	Dana Transfer Umum-DAU		0	0	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-Alat listik -Perlengkapan dinas -BM kebutuhan kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-160 bh -835 bh -97 unit	232.034.500	Dana Transfer Umum-DAU		-160 bh -835 bh -97 unit	232.034.500	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>		<b>100</b>	<b>558.188.600</b>	Dana Transfer Umum-		<b>100</b>	<b>558.188.600</b>	



										DAU				
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Materai 10.000	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1350 lembar	13.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		-1350 lembar	13.500.000	Sub Bagian TU dan Kepegawaian / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	-Tagihan Telpon -Tagihan Air -Tagihan listrik -Tagihan Internet -Tagihan TV berlangganan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-24 Rekening -24 Rekening -24 Rekening -24 Rekening	196.729.600	Dana Transfer Umum-DAU		-24 Rekening -24 Rekening -24 Rekening -24 Rekening	196.729.600	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mesin potong rumput penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih jasa cleaning servis	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	- 1 unit - 1674 buah - 12 bulan	347.959.000	Dana Transfer Umum-DAU		- 1 unit - 1674 buah - 12 bulan	347.959.000	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang milik daerah yang berkondisi baik</b>		<b>100</b>	<b>3.034.772.000</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>3.034.772.000</b>	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 16 unit dalam 1 tahun	Semua Kabupaten/ Kota, semua Kecamatan, semua kelurahan	12 bulan	732.110.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 bulan	732.110.000	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan	Kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional sebanyak 4 unit dalam 1 tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 bulan	410.450.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 bulan	410.450.000	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas dalam 1 tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 bulan	1.499.192.000	Dana Transfer Umum-DAU			1.499.192.000	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-Pelumas -Perabot kantor -Alat listrik -pemeliharaan alat kantor -paket pengerjaan pemeliharaan kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-230 liter -2 unit -191 bh -101 unit 3 paket	393.020.000	Dana Transfer Umum-DAU		-230 liter -2 unit -191 bh -101 unit 3 paket	393.020.000	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan



4	02	01	2.14		<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>100</b>	<b>419.895.000</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>419.895.000</b>	
4	02	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlayannya protokol pimpinan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 laporan	119.944.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 laporan	119.944.000	Sub Bagian Humas, Protokoler dan Publikasi / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Komprensi Pers	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 kali	65.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 kali	65.000.000	Sub Bagian Humas, Protokoler dan Publikasi / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	01	2.14	03	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	-Pendokumentasian tugas pimpinan - Cetak foto kegiatan pimpinan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-12 laporan -3000 lembar	234.951.000	Dana Transfer Umum-DAU		-12 laporan -3000 lembar	234.951.000	Sub Bagian Humas, Protokoler dan Publikasi / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	01	2.15		<b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>100</b>	<b>12.451.947.500</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>12.451.947.500</b>	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang	12.173.207.500	Dana Transfer Umum-DAU		35 orang	12.173.207.500	Sub Bagian Program dan Keuangan / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-PSH DPRD -PSR DPRD -PDH DPRD -Pin DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-35 stel -35 stel -70 stel -7 gr	226.240.000	Dana Transfer Umum-DAU		-35 stel -35 stel -70 stel -7 gr	226.240.000	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Check UP DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	35 orang	52.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		35 orang	52.500.000	Sub Bagian TU dan Kepegawaian / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.16		<b>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>100</b>	<b>778.182.300</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>778.182.300</b>	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan	Kab. Lima	12 bulan	23.860.000	Dana		12 bulan	23.860.000	Sub Bagian TU dan



					Administrasi Keanggotaan DPRD	Administrasi keanggotaan DPRD	Puluh Kota, Harau, Sarilamak			Transfer Umum-DAU				Kepegawaian / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	-Makanan fraksi -Minuman fraksi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-225 porsi makanan -225 porsi minuman	31.130.200	Dana Transfer Umum-DAU		-225 porsi makanan -225 porsi minuman	31.130.200	Sub Bagian TU dan Kepegawaian / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-Pelaksanaan Rapat AKD- -pelaksanaan rapat paripurna -Pembayaran Honor THL	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-135 kali -40 kali -120 OB	357.010.600	Dana Transfer Umum-DAU		-135 kali -40 kali -120 OB	357.010.600	Sub Bagian TU dan Kepegawaian / Bagian Umum dan Keuangan
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	-pengadaan Komputer -ATK -peralatan komputer -Perlengkapan dinas -Televisi -lemari arsip	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-14 unit -325 bh -13 unit -12 unit -4 unit 3 unit	366.181.500	Dana Transfer Umum-DAU		-14 unit -325 bh -13 unit -12 unit -4 unit 3 unit	366.181.500	Sub Bagian Rumah Tangga / Bagian Umum dan Keuangan
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>		<b>100</b>	<b>20.599.279.100</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>20.599.279.100</b>	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>100</b>	<b>5.340.872.600</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>5.340.872.600</b>	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan Propemperda	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 SK	5.002.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 SK	5.002.000	Sub Bagian kajian Perundang-Undangan / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam satu tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	13 Ranperda	5.199.934.200	Dana Transfer Umum-DAU		13 Ranperda	5.199.934.200	Sub Bagian kajian Perundang-Undangan / Bagian Persidangan dan Kajian





															Perundang-Undangan
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Perundang-undangan yang di kaji	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 Per-UU	21.823.400	Dana Transfer Umum-DAU		12 Per-UU	21.823.400	Sub Bagian kajian Perundang-Undangan / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	naskah akademik Peraturan Daerah yang disusun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 dokumen	94.113.000	Dana Transfer Umum-DAU		3 dokumen	94.113.000	Sub Bagian kajian Perundang-Undangan / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan	
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	dokumen Tatib	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	20.000.000	Sub Bagian kajian Perundang-Undangan / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>100</b>	<b>196.503.500</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>196.503.500</b>		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	32.970.000	Dana Transfer Umum-DAU		2 dokumen	32.970.000	Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran/ Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	2 dokumen	32.880.000	Dana Transfer Umum-DAU		2 dokumen	32.880.000	Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran/ Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Nota Kesepakatan APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	31.856.400	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	31.856.400	Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran/ Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Nota Kesepakatan Perubahan APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	33.062.400	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	33.062.400	Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran/ Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan	Nota Kesepakatan	Kab. Lima	1 dokumen	33.062.300	Dana		1 dokumen	33.062.300	Sub Bagian Fasilitasi	



					Semester	laporan Semesteran	Puluh Kota, Harau, Sarilamak			Transfer Umum-DAU				Penganggaran/ Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Catatan atas laporan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	32.672.400	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	32.672.400	Sub Bagian Fasilitas Penganggaran/ Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>100</b>	<b>451.524.000</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>451.524.000</b>	
4	02	02	2.02	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Koordinasi dan konsultasi Pengawasan urusan Pemerintahan dan Hukum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	30 Orang	235.664.500	Dana Transfer Umum-DAU		30 Orang	235.664.500	Sub Bagian Fasilitas Pengawasan / Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.02	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	147.280.500	Dana Transfer Umum-DAU		3 laporan	147.280.500	Sub Bagian Fasilitas Pengawasan / Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.02	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	23.493.300	Dana Transfer Umum-DAU		3 laporan	23.493.300	Sub Bagian Fasilitas Pengawasan / Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.02	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	4.857.000	Dana Transfer Umum-DAU		3 laporan	4.857.000	Sub Bagian Fasilitas Pengawasan / Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.02	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	4.875.000	Dana Transfer Umum-DAU		3 laporan	4.875.000	Sub Bagian Fasilitas Pengawasan / Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.02	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Laporan Capaian TLH Temuan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 laporan	25.657.700	Dana Transfer Umum-DAU		3 laporan	25.657.700	Sub Bagian Fasilitas Pengawasan / Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.02	07	Pengawasan Penggunaan	Laporan Evaluasi	Kab. Lima	3 laporan	4.857.000	Dana		3 laporan	4.857.000	Sub Bagian Fasilitas



					Anggaran	Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Puluh Kota, Harau, Sarilamak			Transfer Umum-DAU				Pengawasan / Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.02	08	Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 laporan	4.857.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 laporan	4.857.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan / Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>100</b>	<b>5.151.466.500</b>	Dana Transfer Umum-DAU			<b>5.151.466.500</b>	
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	-Bimtek dalam provinsi -Bimtek luar provinsi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-3 kali -3 kali	947.887.000	Dana Transfer Umum-DAU		-3 kali -3 kali	947.887.000	Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan / Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	-Majalah/buletin DPRD -Langganan koran 1 -Langganan Majalah Nasional -	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-12 edisi -41760 eksemplar -2080 eksemplar	1.366.756.00	Dana Transfer Umum-DAU		-12 edisi -41760 eksemplar -2080 eksemplar	1.366.756.00	Sub Bagian Humas, Protokoler dan Publikasi / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pembayaran honorarium Ahli AKD -Jasa Apraisal	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-24 OB -1 Apraisal	137.999.000	Dana Transfer Umum-DAU		-24 OB -1 Apraisal	137.999.000	Sub Bagian kajian Perundang-Undangan / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pembayaran honorarium Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	96 OB	319.791.000	Dana Transfer Umum-DAU		96 OB	319.791.000	Sub Bagian kajian Perundang-Undangan / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Komperensi Pers	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 kali	234.104.000	Dana Transfer Umum-DAU		3 kali	234.104.000	Sub Bagian Humas, Protokoler dan Publikasi / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya dokumen penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-		1 dokumen	10.000.00	Sub Bagian Persidangan dan Risalah / Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan



										DAU				
4	02	02	2.05		<b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>100</b>	<b>1.182.935.100</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>1.182.935.100</b>	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kunjungan Kerja Komisi ke Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-360 OH	263.517.100	Dana Transfer Umum-DAU		-360 OH	263.517.100	Sub Bagian Humas, Protokoler dan Publikasi / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	-Hearing/dialog dalam satu tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	-20 kali	127.375.000	Dana Transfer Umum-DAU		-20 kali	127.375.000	Sub Bagian Kerjasama dan dan Aspirasi/ Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Reses anggota DPRD dalam satu tahun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	3 kali	792.043.000	Dana Transfer Umum-DAU		3 kali	792.043.000	Sub Bagian Kerjasama dan dan Aspirasi/ Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.06		<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>100</b>	<b>170.000.900</b>	Dana Transfer Umum-DAU		<b>100</b>	<b>170.000.900</b>	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 dokumen	132.750.900	Dana Transfer Umum-DAU		1 dokumen	132.750.900	Sub Bagian kajian Perundang-Undangan / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kasus pelanggaran kode Etik DPRD yang diselesaikan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Laporan	32.750.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	32.750.000	Sub Bagian kajian Perundang-Undangan / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
4	02	02	2.07		<b>Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah</b>		<b>100</b>	<b>43.674.500</b>	Dana Transfer Umum-		<b>100</b>	<b>43.674.500</b>	





4	02	02	2.08	02	Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Laporan Kinerja DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	1 Dokumen	49.384.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	49.384.000	Sub Bagian Fasilitas Pengawasan / Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	12 kegiatan	30.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 kegiatan	30.000.000	Sub Bagian Persidangan dan Risalah / Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Konsultasi Pimpinan DPRD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	30 kali	982.918.200	Dana Transfer Umum-DAU		30 kali	982.918.200	Sub Bagian Humas, Protokoler dan Publikasi / Bagian Persidangan dan Kajian Perundang-Undangan
					<b>Jumlah</b>				<b>44.050.852.537</b>				<b>44.113.303.337</b>	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini disusun belum mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.. Namun demikian, acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adalah Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Renja Sekretariat DPRD memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Sekretariat DPRD, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Sekretariat DPRD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2022, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.



Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal Desember 2021

  
M. DARMAWIJAYA.SH  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 196909 200003 1 006

